ISSN 2776-4389
INSPIRE JOURNAL
Economics and Development Analysis
https://ejournal.uksw.edu/inspire | inspire.journal@uksw.edu
Vol.2 No.2 November 2022

DETERMINAN EKSES PENAWARAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BANTEN

Ivan Sahata, Nugroho Silaban, Sotya Fevriera, Prapto Yuwono
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
email korespondensi: sotya.fevriera@uksw.edu

ABSTRACT

This study aims to determine factors that affect the open unemployment rate (OUR) in Banten Province during 2011 - 2020. This study uses panel data. The model chosen in this study is the fixed effect model estimated using the Driscoll-Krays standard error. The results of this study indicate that real GDP and HDI do not have a negative significant effect on OUR while UMK has a positive significant effect on OUR and changes in the inflation rate have a negative significant effect on OUR.

Keywords: Real GDP, Human Development Index, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, Driscoll-Krays standart error

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada tahun 2011-2020. Penelitian ini menggunakan data panel. Model yang terpilih pada penelitian ini adalah model *fixed effect* yang diestimasi dengan *Driscoll-Krays standart error.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB riil dan IPM tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT sedangkan UMK berpengaruh signifikan positif terhadap TPT dan perubahan tingkat inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT.

Kata Kunci: PDRB Riil, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran Terbuka, Driscoll-Krays standart error

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang berperan dalam menentukan keberhasilan kinerja di suatu negara. Berdasarkan tingkat penganggurannya, dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran (DPR RI, 2017). Hal ini bisa terjadi karena tingkat pengangguran berdampak pada berkurangnya pendapatan nasional dari sektor pajak, sebab tingginya tingkat pengangguran menyebabkan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun ikut turun. Jika pajak berkurang, tentunya akan mengurangi kegiatan ekonomi pemerintah sehingga kegiatan pembangunan pun akan menurun. Selain itu, pengangguran berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat sehingga permintaan

Received :June 10, 2022 | Revised: October 3, 2022 | Accepted: November 13, 2022

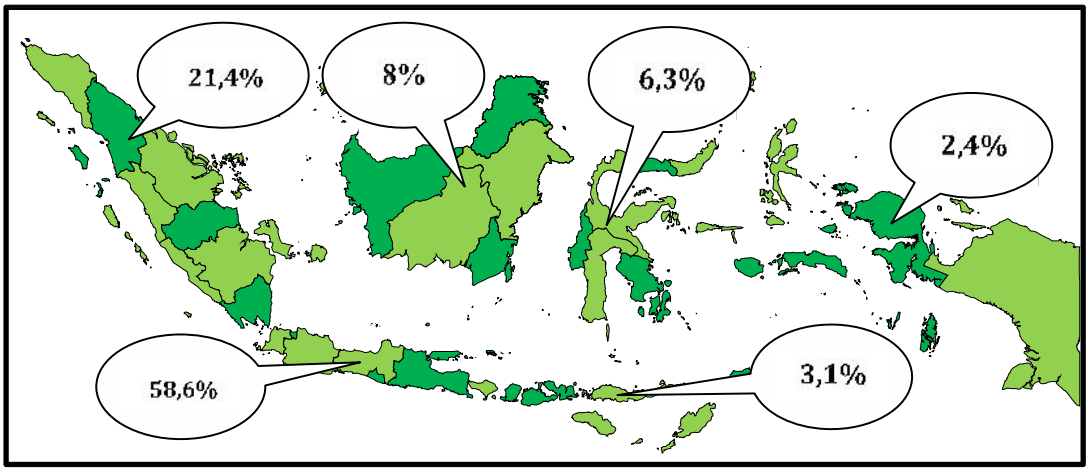
agregat tentu akan berkurang. Keadaan ini tentunya tidak menarik bagi para investor untuk melakukan perluasan atau mendirikan industri baru di daerah tersebut. Akibatnya investasi dalam negeri akan berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terpacu (Basrowi *et al*. 2018).

Pada awal tahun 2020, terjadi pandemi virus *Covid-19* yang menjadi ancaman serius bagi seluruh negara. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi bukan hanya dalam hal kesehatan, namun juga dalam hal sosial, politik, ekonomi, tak terkecuali tenaga kerja. Terlebih lagi dengan adanya aturan pemeritah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga memengaruhi sektor transportasi, UMKM, serta transaksi berbagai sektor bisnis lainnya (Kinantya, 2021).

Dengan adanya aturan pembatasan kegiatan, tentunya sangat berdampak terhadap masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Sebab penerapan aturan ini akan menurunkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak terhadap jatuhnya daya beli masyarakat. Selain itu bagi pengusaha sektor industri terpaksa mengurangi jumlah karyawan atau pekerjanya sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan atau pekerjanya untuk menanggulangi pandemi *Covid-19*, sehingga menimbulkan permasalahan baru, yaitu pengangguran (Rusman, 2021).

Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat kawasan industri harusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri di pulau Jawa terhadap PDB nasional. Sedangkan wilayah lain masih belum bisa berkontribusi banyak, seperti pulau Sumatera dan Kalimantan. Berbeda halnya dengan pulau-pulau lain yang berada di wilayah tengah dan Timur Indonesia, meskipun wilayah dan potensi alamnya cukup luas namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih sangat kecil.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun 5 tahun terakhir pulau Jawa menjadi penyumbang dengan memberikan



Sumber: BPS diolah, 2021

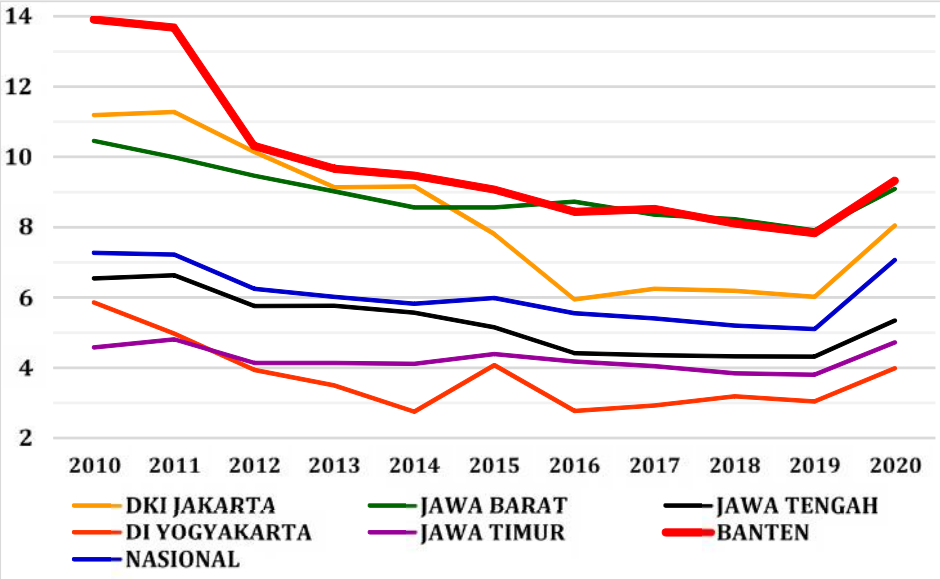
Gambar 1 Rata-Rata Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pulau Terhadap PDB Nasional Tahun 2016-2020 (persen)

kontribusi terbesar terhadap PDB Nasional, diikuti pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan yang memberikan kontribusi paling sedikit pulau Maluku dan Papua. Pada peralihan tahun 2019-2020 beberapa pulau terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19 meliputi pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sebaliknya dampak Covid-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi pulau Sulawesi, pulau Maluku dan papua, dan pulau Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mampu memberi peluang kerja yang lebar jika ditopang dengan tumbuh dan kembangnya sektor riil, di mana sektor riil akan jauh berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor finansial (DPR RI, 2017). Adanya hubungan yang kuat antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dimana penduduk yang bekerja memiliki kontribusi dalam menghasilkan jasa serta barang, sedangkan pengangguran sendiri tidak memberikan kontribusi apapun.

Gambar 2 menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Pulau Jawa hamper di semua tahun pada periode 2010-2020. TPT Provinsi Banten bahkan lebih tinggi daripada TPT Indonesia.

Menurut Wahyuni (2005) tingginya pertumbuhan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk pada dasarnya memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar menjadi modal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun, jika peningkatan jumlah penduduk tidak terkendali, akan menjadi bumerang bagi wilayah/daerah tersebut. Hal ini karena jumlah penduduk yang besar bisa memicu/menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial



Catatan: TPT merupakan rata-rata dari TPT bulan Februari dan Agustus.
Sumber: BPS diolah, 2021

Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa Tahun 2010-2020

terutama di bidang ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak disertai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka dapat mengakibatkan penyerapan tenaga kerja tidak maksimal, sebab mereka tidak memilki kemampuan yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan pekerjaan di wilayah tersebut. Kualitas SDM dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian Putra (2016) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan studi Sanitra (2020) di Indonesia menyatakan IPM memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap TPT. Namun, pada penelitian Arizal (2019) di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan studi Hasibuan (2021) di Indonesia menemukan IPM berpengaruh positif terhadap TPT.

Selain laju pertumbuhan PDRB, IPM, serta inflasi, upah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran. Peningkatan upah mampu meningkatkan etos kerja para pekerja sehingga meningkatkan produktivitas mereka. Menurut Yacoub dan Firdayanti (2019) peningkatan upah memberikan pengaruh terhadap peningkatan penawaran tenaga kerja. Ketika upah naik, penawaran jasa dari masyarakat kepada perusahaan meningkat sehingga pengangguran turun. Namun bisa juga terjadi sebaliknya. Peningkatan upah menyebabkan perusahaan harus memilih antara tetap menggunakan tenaga kerja atau menggantikannya dengan mesin/teknologi. Saat perusahaan ingin mempertahankan tingkat produksinya, maka peningkatan upah akan membuat biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Apabila fungsi tenaga kerja dapat digantikan oleh mesin dengan biaya yang lebih murah, maka tentu pengunaan jumlah tenaga kerja akan dikurangi dan digantikan dengan mesin produksi. Hal ini berdampak pada peningkatan pengangguran (Yacoub & Firdayanti 2019).

Studi Wardiansyah dan Bahri (2016) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Priastiwi (2018) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Megantara *et al*. (2020) di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menemukan upah minimum berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT. Namun hasil penelitian Yacoub dan Firdayanti (2019) di Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Putra (2016) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta Rambe *et al*. (2019) di Provinsi Jambi menyimpulkan upah minimum berpengaruh signifikan positif terhadap TPT.

Indikator ekonomi lainya yang dapat berpengaruh terhadap TPT adalah tingkat inflasi. Penelitian Arianti (2020) di Provinsi Jawa Tengah dan Tutupoho (2019) di kabupaten/kota di Provinsi Maluku menyimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT.

Melihat tingginya TPT di Provinsi Banten dan adanya beberapa perbedaan hasil dari beberapa penelitian di atas membuat penelitian serupa masih menarik untuk dilakukan dengan tempat dan periode yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah PDRB riil, IPM, upah minimum dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap TPT di kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010-2020. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah provinsi Banten sehingga TPT di provinsi Banten dapat ditekan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tingka Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan indikator yang dipakai dalam mengukur ketidakterserapan tenaga kerja oleh pasar tenaga kerja serta menggambarkan pasokan tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan (BPS, 2022j). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius.

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2022j):

$$TPT = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} \text{ x } 100\% \text{.....(1)}$$

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang berkerja, memiliki pekerjaan namun tidak bekerja untuk sementara atau pengangguran (BPS, 2022a).

Lebih lanjut menurut Mankiw (2019), terdapat dua macam pengangguran, yaitu pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena orang membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena pekerjaan yang tersedia tidak memadai untuk memenuhi permintaan pekerjaan dari semua orang yang membutuhkannya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika terjadi peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dari tahun sebelumnya serta menghasilkan pendapatan tambahan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu (DPR RI, 2017).

PDRB sebagai salah satu perangkat data ekonomi digunakan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan di suatu daerah (tingkat kota/kabupaten maupun provinsi). PDRB dapat difungsikan dalam menetapkan formulasi kebijakan, *velocity of* money, pajak, pengembangan model-model ekonomi, dan sebagainya (BPS Kabupaten Dharmasraya, 2018).

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan cara mengukur tingkat pertumbuhan ekonominya melalui konsep yang kita kenal dengan istilah PDRB yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur (BI Palembang, 2006). Pertumbuhan PDRB dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (BPS, 2022h):

$$Laju\ Pertumbuhan\ PDRB = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \text{ x } 100\% \text{.....(2)}$$

di mana $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun *t* dan $PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto 1 tahun sebelum tahun *t*.

Berdasarkan tingkat harga, PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHK atau dikenal

juga sebagai PDRB riil menunjukkan nilai tambah barangdan jasa yang didasarkan pada harga pada tahun 2010, sedangkan PDRB ADHB atau dikenal juga sebagai PDRB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB riil digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan), sedangkan PDRB nominal guna melihat pergeseran serta struktur ekonomi (BPS Provinsi Banten, 2022c).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut (BPS, 2022b), IPM atau *human development index* (*HDI*) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memeroleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yang meliputi umur panjang dan hidup sehat (dimensi kesehatan), pengetahuan (dimensi pendidikan), dan standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan nyata per orang (dimensi pengeluaran) (Putra, 2016). Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran (BPS, 2022g):

$$IPM = \sqrt[3]{Indeks\ Kesehatan \times Indeks\ Pendidikan \times Indeks\ Pengeluaran} \times 100 \quad ...(3)$$

Upah Minimum Regional (UMR)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 tahun 2021 (BPK, 2021) tentang pengupahan pada pasal 1 menjelaskan upah merupakan hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Pada pasal 23 dipaparkan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu: a) upah tanpa tunjangan atau b) upah pokok dan tunjangan tetap. Pada pasal 24 juga ditegaskan bahwa upah minimum berlaku bagi buruh/pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan upah bagi buruh/pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, berpedoman pada stuktur dan skala upah.

Menurut Indarti (2016) pasar tenaga kerja menjelaskan hubungan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang dikaitkan dengan upah. Korelasi antara penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja yang menentukan besaran tingkat upah yang diperoleh tenaga kerja sertsa besarnya penggunaan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran (Haryani, 2002).

Inflasi

Pengertian inflasi secara umum diartikan sebagai fluktuasi harga-harga umum secara terus menerus selama dalam suatu periode tertentu (Utari *et al*., 2015). Dengan demikian beberapa unsur dalam pengertian inflasi perlu diketahui adalah: (1) inflasi merupakan proses

kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang - barang dan jasa secara terus menerus, (2) kenaikan harga barang-barang ini tidak berarti harus naik dengan persentase yang sama, yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu (satu bulan atau satu tahun) dan (3) jika kenaikan harga hanya sekali saja dan bersifat sementara atau secara temporer (sekalipun dalam persentase yang besar) tetapi tidak berdampak meluas bukanlah merupakan inflasi.

Dalam teori kuantitas oleh Irving Fisher inflasi yang terjadi disebabkan oleh jumlah uang beredar dan harapan masyarakat tentang kenaikan harga-harga di masa mendatang (Sutawijaya dan Zulfahmi, 2012). Beda halnya dengan teori Keynes tentang inflasi di mana penyebab terjadinya inflasi adalah karena masyarakat ingin hidup melebihi batas ekonominya yang berimbas pada perebutan barang serta jasa yang mengakibatkan kenaikan permintaan melebihi penawaran sehingga terjadi *inflationar gap* (Sutawijaya dan Zulfahmi, 2012).

Berdasarkan perhitungan inflasi ada 3 indikator yang bisa dipakai untuk menghitung inflasi. Pertama adalah indeks harga konsumen (IHK), yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dari barang serta jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu (BPS, 2022c). Kedua adalah indeks harga perdagangan besar (IHPB), yaitu indeks yang menggambarkan perubahan harga di tingkat perdagangan grosir yang diperdagangkan di suatu daerah/negara (BPS, 2022d). Ketiga adalah PDRB deflator, yaitu indikator mengukur harga dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu provinsi pada saat ini, relatif terhadap harga pada tahun tertentu (tahun dasar). Inflasi yang dihitung dengan PDB deflator dihitung dengan formula sebagai berikut (Mankiw, 2021):

$$PDRB\ Deflator = \frac{PDRB\ Riil_t}{PDRB\ Nominal_t} \text{x}100 = \text{D}f_t \quad \ldots\ldots\ldots (4)$$

$$Tingkat\ Inflasi = \frac{Df_t - Df_{t-1}}{Df_{t-1}} \text{x}100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (5)$$

di mana: Df_t = PDRB deflator pada tahun *t* dan Df_{t-1} = PDRB deflator 1 tahun sebelum tahun *t*.

Penelitian ini menggunakan inflasi yang dihitung dari PDRB deflator karena PDRB deflator (indeks harga implisit) mencangkup semua barang dan jasa dalam perekonomian serta menggambarkan inflasi yang paling mewakili keaadaan sebenarnya (Silitonga, 2021) sehingga inflasi yang dihitung dari PDRB deflator bisa digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan (BPS, 2022e).

Pengaruh PDRB terhadap TPT

Hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terdapat pada hukum Okun, di mana hukum okun menyatakan bahwa ketika tingkat pengangguran naik 1 persen, maka PDB riil akan mengalami penurunan 2 persen (Mankiw, 2019). Blanchard *et al*. (2021) menjelaskan bahwa terdapat hubungan erat antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi karena penduduk yang berkerja memberikan kontribusi dalam menghasilkan jasa dan barang, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi.

Sejalan dengan teori Okun, penelitian Muslim (2014), Wardiansyah dan Bahri (2016), Wibisono *et al*. (2017), dan Priastiwi (2018), menyimpulkan laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Karena itu dalam studi ini diajukan hipotesis:

H1: PDRB berpengaruh negatif terhadap TPT

Pengaruh IPM terhadap TPT

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan SDM melalui *human capital* yang tercermin pada kesehatan, dan tingkat pendidikan mampu mempengaruhi peningkatan produktivitas manusia sehingga permintaan tenaga kerja meningkat dan pengangguran berkurang (Yustie, 2017). Hal itu dapat terjadi karena peningkatan produktivitas mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, sesuai dengan Hukum Okun, peningkatan pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja dan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran berkurang (Palindangan dan Abu Bakar, 2021). Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat menurunkan biaya produksi per unit, sehingga harga jual per unit produksi pun akan ikut turun. Penurunan harga akan menarik minat pembeli sehingga permintaan akan meningkat. Hal akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2020).

Penelitian Putra (2016), Mahroji dan Nurkhasanah (2019), Pratiwi *et al*. (2019), Irwan dan Yuliani (2020) juga menyimpulkan IPM berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Karena itu dalam penelitian ini diajukan hipotesis:
H2: IPM berpengaruh negatif terhadap TPT

Pengaruh UMR Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Kesempatan kerja dan pengangguran juga dapat dipengaruhi oleh upah. Permintaan tenaga kerja dapat berkurang dengan adanya penetapan upah minimum yang diterapkan di tiap Kabupaten/Kota sehingga berdampak pada peningkatan pengangguran. Hal ini bisa terjadi dikarenakan, ketika terjadi peningkatan upah minimum, perusahaan akan terdorong untuk mengurangi penggunaan tenaga kerjanya apabila biaya penggunaan mesin produksi lebih murah daripada biaya penggunaan tenaga kerja. Hasil penelitian Putra (2016), Wibisono *et al*. (2017), Setiawan *et al*. (2017), Rambe *et al*. (2019), Yacoub dan Firdayanti (2019) menyimpulkan upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran. Karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: UMR berpengaruh positif terhadap TPT

Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Bentuk kurva *Phillips* yang memiliki kemiringan menurun menunjukkan adanya hubungan negatif antara perubahan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat inflasi naik, pengangguran rendah, ataupun sebaliknya (Mankiw, 2021). Kurva Phillips menunjukkan bahwa stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi (tingkat pengangguran yang rendah), maka sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi (DPRI RI, 2014). Hal ini karena jika terjadi peningkatan inflasi, maka hal itu akan

meningkatkan harga-harga barang dan jasa akhir. Selanjutnya peningkatan harga-harga akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang kemudian menurunkan pendapatan produsen. Penurunan pendapatan ini akan menyulitkan produsen untuk menutup biaya operasionalnya dan memperkecil profit produsen. Karena itu, cara cepat yang biasanya diambil produsen untuk menurunkan biaya adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Hal ini tentunya akan menambah jumlah pengangguran terbuka. Jadi inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran (Sukirno, 2019).

Sejalan dengan teori kurva Phillps, penelitian Tirta (2013), Azizah (2016), Tutupoho (2019), dan Arianti (2020) menyimpulkan tingkat inflasi berpengnaruh negatif terhadap pengangguran. Karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitan ini adalah:

H4: tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap TPT.

Kerangka Penelitian

Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah diajukan, dapat disusun kerangka penelitian seperti dapat dilihat dalam Gambar 3.

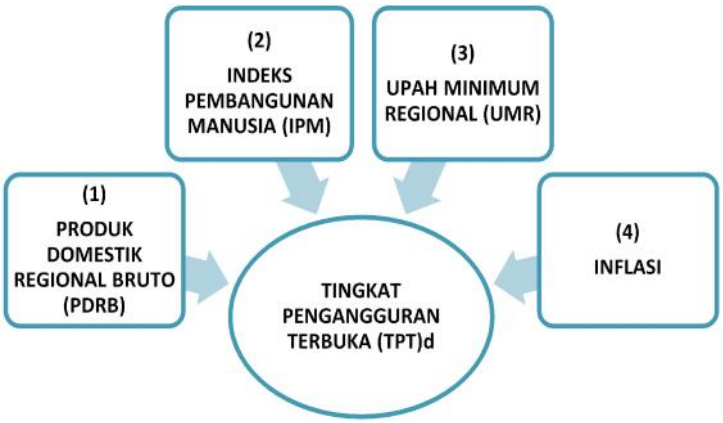
METODA PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari *website* BPS Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten untuk tahun 2011 - 2022. Data tersebut terdiri dari data TPT (BPS Provinsi Banten, 2022d), PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) (BPS Provinsi Banten, 2022b), IPM (BPS Provinsi Banten, 2022a) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) (BPS Provinsi Banten, 2022e).

Pada tahun 2016 BPS tidak melakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) sehingga data TPT pada tahun tahun tersebut tidak tersedia. Agar mendapatkan data panel yang seimbang (*balance*), maka peneliti memutuskan untuk mengestimasi data 2016 tersebut menggunakan rata-rata geometrik (Berenson *et al*., 2020) pertumbuhan TPT dari data TPT tahun 2015 dan 2017:

$$TPT_{2016} = TPT_{2015} \times \sqrt{\left(\frac{TPT_{2017}}{TPT_{2015}}\right)} = \frac{TPT_{2017}}{\sqrt{\left(\frac{TPT_{2017}}{TPT_{2015}}\right)}} \quad \text{.....(6)}$$



Gambar 3 Kerangka Penelitian

Tabel 1 Indikator Empiris

Variabel	Indikator Empiris
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil	Nilai tambah barang dan jasa didasarkan pada harga pada tahun 2010 sehingga perubahannya dapat merefleksikan laju pertumbuhan ekonomi dari setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun (BPS, 2022i).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, yaitu panjang dan umur sehat (indeks kesehatan), pengetahuan (indeks pendidikan), dan standar hidup layak (indeks pengeluaran) (BPS, 2022g).
Upah Minimum Regional (UMR)	Upah bulanan terendah kabupaten/kota berdasarkan bagi pekerja/buruh (BPK, 2021).
Inflasi	Perubahan harga yang dihitung dari PRDB deflator sehingga mencerminkan perubahan harga dari semua barang dan jasa secara keseluruhan (BPS, 2022f).

Rata-rata geometrik hanya dihitung dari tahun 2015 dan 2017 dipilih karena dari hasil observasi, TPT dalam tahun yang diteliti berfluktuasi.

Tabel 1 menyajikan indikator empiris dari variabel-variabel dalam studi ini.

Uji Stasioner (Uji Akar Unit)

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah uji stasioneritas terhadap setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, guna mendapatkan data yang bersifat stasioner (tidak memiliki akar unit). Variabel dapat dikatakan stasioner jika variabel memiliki sebaran data mendekati nilai rata-rata pada variabel tersebut (Juanda & Junaidi, 2012). Pada penelitian ini, uji stasioner yang digunakan adalah *Levin-Lin-Chu unit-root test.*

Berdasarkan Tabel 2, karena semua nilai *p-value* dari variabel yang akan dimasukkan ke model regresi < 0,01 = α, maka hipotesis nol (H_0) uji ini, yaitu data tidak stasioner, ditolak atau semua data lolos uji stasioneritas. Data PDRB ADHK ditranformasi ke bentuk *natural logarithm* agar data memenuhi asumsi stasioneritas data. Transformasi ini selanjutnya juga mengatasi masalah multikolinearitas dalam model. Selanjutnya, pada tingkat level variabel *Inflasi* tidak stasioner, namun ketika diubah ke bentuk *first different*, perubahan tingkat inflasi sudah stasioner. Dengan demikian, dalam pengolahan data selanjutnya, data yang digunakan adalah tahun 2012-2020.

Tabel 2 Uji Stasioner Data (Uji Levin-Lin-Chu)

Nama Variabel	*Adjusted t**	*p-value*	
TPT	–3,0967	0,0010	***
UMK	–5,5151	0,0000	***
LNPDRBADHK	–4,5227	0,0000	***
IPM	–8,0873	0,0000	***
Inflasi	0,5566	0,7111	
DInflasi	–7,6658	0,0000	***

Keterangan: (1) *** artinya signifikan pada a = 0,01,
(2) $DInflasi = Inflasi_t - Inflasi_{t-1}$

Pemilihan Model Data Panel

Untuk menguji model yang sesuai dengan data panel, maka dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan Lagrange *Multiplier*.

Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk memilih manakah model yang lebih sesuai untuk mewakili data panel antara model *pooled least square* dan model *fixed effect* (Nuridah *et al*, 2022). Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas statistik penguji F yang masuk ke daerah kritik (di bagian bawah kanan tabel) (0,0000) < 0,01 = a, maka H_0 uji

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Fixed-effect (*within*) *regression*	*Number of obs* =	72	
Group Variable: Kab_Kota	*Number of groups* =	8	
R^2 *within* = 0,1309	*Obs per group*: *min* =	9	
between = 0,0003	*average* =	9,0	
overall = 0,0015	*max* =	9	
	F(4,60) =	2,26	
corr(u_i, X_b) = –0,8846	Prob > F =	0,0733 ***	

TPT	Koefisien	*St. Error*	t	P > |t|
LNPDRBADHK	–5,7222	4,9882	–1,15	0,256
IPM	–0,0722	0,5552	–0,13	0,897
UMK	0,6465	0,6346	1,02	0,312
DInflasi	–0,1003	0,0741	–1,35	0,181
_cons	112,8419	63,6804	1,77	0,081 *
σ_u	4,5008			
σ_e	1,3045			
ρ	0,9225	(*fraction of variance due to* u_i)		
F test that all u_i = 0: F(7,60) = 9,22			Prob > F = 0,0000 ***	

Keterangan: (1) * artinya signifikan pada α = 0,01, (2) *DInflasi* = $Inflasi_t - Inflasi_{t-1}$, σ = standar deviasi, *u = residuals within groups*, *e = overall residuals*, ρ = *interclass correlation*.

ini, yaitu model *common effect* lebih baik daripada model *fixed effect*, ditolak sehingga dapat disimpulkan *fixed effect model* lebih baik daripada *common effect model*.

Uji Breusch-Pagan Lagrange Multipler

Uji Breusch-Pagan Lagrage *Multiplier* adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah model *common effect* atau model *random effect* yang akan dipilih (Nuridah *et al*., 2022). Berdasarkan Tabel 4, nilai probabilitas statistik penguji *Chi*^{2} yang masuk ke daerah kritik (0,0000) < 0,01 = a, maka H_0 uji ini, yaitu model *common effect* lebih baik daripada model *random effect*, ditolak, artinya model *random effect* lebih baik dibandingkan model *common effect*.

Uji Hausman

Uji *Hausman* adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang akan dipilih (Nuridah *et al*., 2022). Berdasarkan Tabel 5, nilai probabilitas statistik penguji *Chi*^{2} yang masuk ke daerah kirik (0,0000) < 0,01 = α, maka H_0 uji ini, yaitu model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*, ditolak, artinya model *fixed effect* lebih baik.

Tabel 4 Hasil Uji Breusch-Pagan Largange Multiplier

	Var	*Sd* = $\sqrt{Var}$
TPT	5,3566	2,3144
e	1,7018	1,3045
u	0,1166	0,3415
Test: *Var*(*u*) = 0		$\overline{Chi}^2(01)$ = 41,18
		Prob > $\overline{Chi}^2$ = 0,0000 ***

Keterangan: (1) *** artinya signifikan pada α = 0,01, (2) sd = standar deviasi, Var = variasi, *e = overall residuals* dan *u = residuals within groups*.

Tabel 5 Hasil Uji Hausman

Nama Variabel	Koefisien (*b*) *fixed*	(*B*) *random*	(*b* J *B*) *Diffrence*	$\sqrt{diag(V_b-V_B)}$ *S.E.*
LNPDRBADHK	–5,7222	1,7799	–7,5020	6,1501
IPM	–0,0722	–0,3328	0,2606	0,6847
UMK	0,6464	0,0922	0,5542	0,7350
DInflasi	–0,1003	–0,0843	–0,0161	0,0223

b = consistent under H_0 *and* H_1
B = inconsistent under H_1, *efficient under* H_0
Test: H_0: *difference in coefficients not systematic*
$chi^2(4)$ $= (b - B)' [(V_b - V_B)^{-1}](b - B)$
$= 25{,}83$
$Prob > chi^2$ $= 0{,}0000^{***}$

Keterangan: (1) *** artinya signifikan pada a = 0,01, (2) *fixed = fixed effect model, random = random effect model, b* = koefisien regresi *fixed effect model, B* = koefisien regresi *random effect model, S.E. = standard error*.

Rumusan Model

Berdasarkan hasil uji Chow, uji Breusch-Pagan Lagrange *Multiplier* dan uji Hausman maka model yang terbaik adalah *fixed effect model*. Dengan demikian rumusan model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{it} = \beta 0_{it} + \beta 1 \cdot LNPDRABADHKIT_{it} + \beta 2 \cdot IPM_{it} + \beta 3 \cdot UMK_{it} + \beta 4 \cdot DInflasi_{it} + e_{it} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$

di mana: β_1, β_2, β_3, β_4 adalah koefisien regresi variabel bebas dalam model (7), *t* adalah tahun = {2012, …, 2020}, *i* adalah kabupaten/kota di Provinsi Banten, e adalah *error* model, *Y* adalah tingkat pengangguran terbuka (%), *LN* adalah *natural logarithm*, *PDRBADHK* adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 (juta rupiah), *IPM* adalah indeks pembangunan manusia, *UMK* adalah upah minimum regional (juta rupiah) dan $DInflasi = Inflasi_t - Inflasi_{t-1}$ (%).

Cross-Sectional Dependance (*Comtemporaneous Correlation*) dan Driscoll-Krays *Standard Error*

Menurut Hoechle (2007), informasi aktual dari panel mikroekonometrik sering *overstated* karena mengandung ketergantungan antar daerah dan waktu yang dikenal dengan istilah *cross-sectional dependence* (*comtemporaneous correlation*). *Cross-sectional dependence* dapat menyebabkan bias pada statistika inferensia. *Cross-sectional dependence* bisa diuji dengan uji Breusch-Pagan LM untuk independensi (Torres-Reyna, 2007). H_0 dari uji ini adalah residual antar kabupaten/kota tidak berkolerasi. Tabel 6 menyajikan hasil dari uji tersebut.

Berdasarkan pada Tabel 6, nilai probabilitas uji sebesar 0,0004 < 0,01 = a, maka H_0 ditolak atau dapat disimpulkan terjadi masalah *cross-sectional dependance*. Apabila terjadi *cross-sectional dependence*, Hoechle (2007) menyarankan untuk menggunakan Driscoll-Krays *standart error* sehingga hasil estimasi *robust* terhadap gangguan *heteroskedastic*, *autocorrelated of the moving average type with lag length q*, dan *cross-sectionally dependent*.

Tabel 6 Uji Independensi Breusch-Pagan LM

	_e1	_e2	_e3	_e4	_e5	_e6	_e7	_e8
_e1	1,0000							
_e2	–0,2808	1,0000						
_e3	0,4429	–0,2430	1,0000					
_e4	–0,2317	0,2257	–0,5665	1,0000				
_e5	0,2712	–0,7224	–0,0949	0,3040	1,0000			
_e6	–0,6100	0,8590	–0,1054	0,1354	–0,7587	1,0000		
_e7	0,4754	–0,4900	0,3513	0,1232	0,7293	–0,4920	1,0000	
_e8	–0,4230	0,6424	0,3553	–0,2087	–0,7294	0,8781	–0,2706	1,0000

Breusch-Pagan LM test of independence: *chi*2(28) = 60,165, Pr = 0,0004***
Based on 9 complete observations
Keterangan: *** artinya signifikan pada $\alpha = 0,01$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskripsi

Tabel 7 menyajikan statistika deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam model dalam penelitian ini. Rata-rata *TPT* kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2012-2020 kurang dari 10%. Rata-rata *IPM* di kabupaten/kota di Provinsi Banten (70,0688) sudah tergolong tinggi (≥ 70) (BPS, 2022g). Standar deviasi *UMK* (0,9777) dan *LNPDRBADHK* (0,6811) yang mendekati nol menunjukkan data kedua variabel relatif tidak terlalu bervariasi. Rata-rata *DInflasi* yang bernilai negatif mengindikasikan mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Banten selama tahun 2011-2020 mengalami penurunan tingkat inflasi dalam 1 tahun. Standard deviasi *DInflasi* yang jauh lebih besar daripada nilai mutlak rata-ratanya menunjukkan data *DInflasi* sangat bervariasi.

Uji Pemenuhan Asumsi Model

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual model berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan Tabel 8, nilai probabilitas dari uji normalitas residual secara keseluruhan (0,0971) > 0,05 = α. Artinya H_0 dari uji ini, yaitu residual

Tabel 7 Statistika Deskriptif Variabel dalam Model

	TPT	*IPM*	*UMK*	*DInflasi*	*LNPDRBADHK*
Obs	72	72	72	72	72
Mean	9,4963	70,0688	2,6690	–0,6050	17,4918
Std. Deviasi	2,3144	6,0634	0,9155	2,2174	0,6811
Min	4,56	60,22	1,0478	–12,6708	16,4357
Max	14,8	81,48	5,1529	4,4658	18,5214

Keterangan: $DInflasi = Inflasi_t - Inflasi_{t-1}$

Tabel 8 Uji Normalitas

Test for skewness and kurtosis *Number of obs* = 72
Replications = 50
(Replications based on 8 clusters in Kab_Kota)

	Observed Coef.	***Bootstrap Std. Err.***	**z**	**P > |z|**	***Normal-based* 95% Conf. Interval**	
Skewness$_e$	–0,428	0,624	–0,69	0,493	–1,651	0,796
Kurtosis$_e$	2,614	1,276	2,05	0,041	0,112	5,115
Skewness$_u$	–11,118	35,753	–0,31	0,756	–81,192	58,956
Kurtosis$_u$	–566,603	281,289	–2,01	0,044	–1117,918	–15,288

Joint test for Normality on e: chi^2 (2) = 4,66 Prob > chi^2 = 0,0971**
Joint test for Normality on u: chi^2 (2) = 4,15 Prob > chi^2 = 0,1253*
Keterangan: *dan** artinya berturut-turut tidak signifikan pada $\alpha = 0,1$ dan 0,05

model secara keseluruhan berdistribusi normal residual, tidak ditolak. Begitu pula dengan nilai probabilitas dari uji normalitas residual dalam kelompok kabupaten/kota (0,1253) > 0,1 = α. Berarti H_0 dari uji ini, yaitu, residual dalam kelompok kabupaten/kota berdistribusi normal, tidak ditolak.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9 menunjukkan bahwa korelasi dari koefisien dari model regresi di bawah 0,9 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas (tidak ada korelasi kuat antar variabel bebas).

Estimasi Model *Fixed Effect*

Tabel 10 menyajikan hasil estimasi dari model *fixed effect*.

Uji F

Berdasarkan Tabel 10, nilai probabilitas staistik penguji F yang masuk ke daerah kritik (0,0005) < 0,05 = α. Artinya, PDRB riil, IPM, UMK dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi TPT. Nilai R^2 dari model ini menunjukkan PDRB riil, IPM, UMK dan inflasi hanya dapat menjelaskan 13,09% dari variasi nilai TPT. Nilai yang tidak terlalu besar tersebut menunjukkan, masih ada variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan TPT tetapi belum dimasukkan ke dalam model.

Uji t

Hasil uji pengaruh variabel bebas secara individual menurut Tabel 10 adalah sebagai berikut. Pertama, nilai *p-value* dari uji pengaruh PDRB riil (*LNPDRBADHK*) terhadap TPT (0,140) > 0,1 = α yang menunjukkan PDRB riil tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT. Temuan ini juga serupa dengan penelitian Darman (2013) yang menyimpulkan tingkat pengangguran tidak responsif terhadap perubahan ouput riil. Menurut Darman (2013),

Tabel 9 Matriks Korelasi dari Koefisien Model *Fixed Effect* dengan Driscoll-Krays *Standard Error*

e(*V*)	*LNPDRBADHK*	*IPM*	*UMK*	*DInflasi*	*_cons*
LNPDRBADHK	1,0000				
IPM	–0,8837	1,0000			
UMK	–0,3431	–0,1202	1,0000		
DInflasi	–0,7922	0,7911	0,1169	1,0000	
_cons	–0,9691	0,7411	0,5550	0,7200	1,0000

Tabel 10 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect* dengan Driscoll-Krays *Standard Error*

Regression with Driscoll-Kraays standard errors		*Number of obs* =	72
Method: *Fixed-effects regression*		*Number of groups* =	8
Group variable (*i*): Kab_Kota		F(4,8) =	17,52
Maximum lag: 2		Prob > F =	0,0005 ***
		within R^2 =	0,1309

TPT	**Koefisien**	***St. Error***	**t**	**P > |t|**	
LNPDRBADHK	–5,7222	4,9426	–1,16	0,140	
IPM	–0,0722	0,4684	–0,15	0,441	
UMK	0,6464	0,3265	1,98	0,042	**
DInflasi	–0,1003	0,0248	–4,04	0,002	***
_cons	112,8419	58,9222	1,92	0,046	**

Keterangan: (1) nilai peluang dari statistik penguji t yang disajikan adalah untuk uji 1 sisi, (2) ** dan *** artinya berturut-turut signifikan pada a = 0,05 dan 0,01.

hal ini karena di Indonesia masih terdapat pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Hal ini juga menunjukkan di negara berkembang seperti Indonesia, produksi yang bersifat *labor intensive* lebih banyak menggunakan *unskilled labor* dibandingkan *skilled labor* sehingga *skilled labor* kesulitan mencari pekerjaan. Selain itu, hal ini mengindikasikan di Indonesia kemungkinan mulai banyak industri yang lebih memilih produksi dengan *capital intensive*. Produksi dengan *labor intensive* menjadi kurang menarik produsen karena UMR di Indonesia naik setiap tahun dan banyaknya masalah dengan buruh seperti pemogokan kerja.

Kedua, nilai *p-value* dari uji pengaruh IPM terhadap TPT (0,441) > 0,1 = α yang menunjukkan IPM tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT. Hal ini memperkuat kesimpulan di alinea sebelumnya bahwa industri di Indonesia lebih banyak mempekerjakan *unskilled labor* sehingga meskipun IPM di Provinsi Banten sudah tergolong tinggi (lihat Tabel 7), namun banyak yang tidak bisa terserap di dunia kerja sehingga TPT menjadi tinggi. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, maka akan ada kecenderungan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan minatnya dan ketrampilannya serta mempertimbangkan upah yang didapat. Apabila upah serta pekerjaan tidak sesuai dengan harapannya, akan ada kecenderungan tenaga kerja untuk menunggu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya (Ernawaningtyas, 2021).

Ketiga, nilai *p-value* dari variabel UMK terhadap variabel TPT (0,042) < 0,05 = α yang menunjukkan bahwa variabel UMK berpengaruh signifikan positif terhadap TPT. Koefisien variabel UMK sebesar 0,6464, artinya setiap terjadi peningkatan UMK sebesar Rp 1 juta, maka akan diikuti dengan peningkatan TPT sebesar 0,6464%. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari (Putra, 2016), Wibisono *et al*. (2017), Setiawan *et al.* (2017), Rambe *et al*. (2019) dan Yacoub dan Firdayanti (2019).

Pemerintah hampir selalu menaikkan UMK setiap tahun. Tingkat upah yang naik mengakibatkan perusahaan harus membuat pilihan antara tetap menggunakan tenaga kerja tetapi dengan beban biaya produksi yang lebih tinggi atau melakukan investasi untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin atau teknologi. Pengaruh positif tersebut menunjukkan peningkatan UMK dapat membuat perusahaan memutuskan untuk menggunakan lebih banyak mesin apabila produksi menggunakan mesin dirasa menjadi lebih murah daripada produksi menggunakan tenaga manusia. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerjanya sehingga pengangguran meningkat.

Keempat, nilai *p-value* dari perubahan tingkat inflasi dalam 1 tahun terhadap TPT (0,002) < 0,01 = α yang menunjukkan perubahan tingkat inflasi dalam 1 tahun berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT. Nilai koefisien regresi sebesar –0,1003 artinya ketika perubahan tingkat inflasi dalam 1 tahun naik sebesar 1% maka TPT akan turun sebesar 0,1003%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tirta (2013), Azizah (2016), Tutupoho (2019) dan Arianti (2020) serta mendukung teori kurva *Phillps*. Teori kurva Phillips menjelaskan bahwa hubungan

antara tingkat pengangguran dan inflasi didasarkan pada asumsi bahwa inflasi digambarkan sebagai kenaikan permintaan barang dan jasa secara agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka apabila permintaan tersebut tidak bisa segera dipenuhi, maka akan terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) sehingga harga akan naik. Dalam jangka pendek, tingginya tingkat inflasi yang didorong oleh meningkatnya permintaan akan mendorong produsen untuk berusaha memenuhi permintaan tersebut dengan cara meningkatkan kapasitas produksinya melalui penambahan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja tersebut kemudian menurunkan TPT.

Terakhir, konstanta model bernilai positif sebesar 112,8419. Kontribusi konstanta model tersebut dalam menjelaskan TPT signifikan karena *p-value* dari konstanta model (0,092) $< 0,1 = \alpha$. Hal ini menunjukkan terdapat variabel-variabel lain, selain PDRB riil, IPM, UMK dan tingkat inflasi yang dapat memengaruhi TPT, tetapi dalam model ini pengaruh tersebut dianggap konstan (diwakili oleh nilai konstanta model). Hasil ini mendukung nilai koefisien determinasi model yang bernilai kecil (13,09%).

Estimasi Konstanta Model untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

Bahwa model *fixed effect* adalah model yang terbaik berarti nilai koefisien regresi dari semua variabel dalam model berlaku di semua kabupaten/kota di Provinsi Banten. Namun, konstanta model berbeda-beda untuk setiap kabupaten/kota. Nilai koefisien regresi dari model *fixed effect* yang diestimasi dengan Driscoll-Krays *standard error* akan sama dengan nilai koefisien regresi dari model regresi yang diestimasi dengan metode *ordinary least suare* (*OLS*) dengan memasukkan *dummy variables* untuk kabupaten/kota di Provinsi Banten ke dalam model. Model tersebut dikenal dengan nama model *LSDV* (*the Least Square Dummy Variable*). Koefisien regresi dari *dummy variables* tersebut merupakan konstanta model untuk kabupaten/kota di Provinsi Banten. Tabel 11 menyajikan hasil estimasi nilai konstanta untuk kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Perbedaan konstanta model tersebut menunjukkan perbedaan kontribusi dari variabel-variabel yang belum dimasukkan ke dalam model dan dianggap konstan nilainya, antar kabupaten/kota. Variabel-variabel tersebut diduga adalah jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja dan persentase penduduk miskin. Rata-rata nilai ketiga variabel dalam periode penelitian (2012-2020) mempunyai korelasi cukup kuat dengan konstanta model untuk kabubpaten/kota di Provinsi Banten.

Tabel 11 Konstanta Model untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Konstanta Model	Kabupaten/Kota	Konstanta Model
Kabupaten Tangerang	117,6570	Kota Tangerang Selatan	111,3535
Kabupaten Serang	116,8541	Kota Serang	108,6213
Kota Cilegon	116,8208	Kabupaten Pandeglang	107,6283
Kota Tangerang	116,3383	Kabupaten Lebak	107,6215

Tabel 12 Korelasi Konstanta Model untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Beberapa Variabel di Luar Model

Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Penduduk Miskin
0,4448	0,4596	–0,5736

Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak jumlah angkatan kerja. Semakin banyak jumlah angkatan kerja, maka semakin besar peluang akan ada banyak pengangguran sehingga TPT akan cenderung tinggi. Semakin besar persentase penduduk miskin, semakin banyak kualitas sumber daya manusia yang rendah. Mereka akan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan lebih mudah diganti dengan tenaga mesin sehingga TPT akan cenderung tinggi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, IPM, UMK dan inflasi terhadap TPT di Provinsi Banten tahun 2011 – 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama PDRB riil, IPM, UMK dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap TPT dan dapat menjelaskan 13,09% variasi nilai TPT. Secara individual, PDRB riil tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT, variabel IPM tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT, UMK berpengaruh signifikan positif terhadap TPT dan perubahan tingkat inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap TPT.

Saran

Saran untuk Arah Kebijakan

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mengusulkan beberapa saran sebagai berikut. Karena hasil penelitian ini menunjukan peningkatkan inflasi menurunkan TPT, maka pemerintah perlu selalu mengontrol inflasi agar tidak disebabkan oleh peningkatan biaya produksi karena hal itu dapat memicu PHK dan meningkatkan pengangguran. Karena itu kebijakan pencabutan subsidi BBM dan listrik yang akan meningkatkan inflasi dari sisi biaya produksi harus diimbangi dengan kebijakan untuk mempermudah dunia usaha dari sisi yang lain agar hal itu tidak memicu terjadinya PHK.

Kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar mendorong peningkatan permintaan secara sehat agar hal itu meningkatkan produksi, perekrutan tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan pengangguran. Pemerintah perlu menciptakan situasi yang kondusif untuk dunia usaha agar saat terjadi inflasi, hal itu diharapkan lebih karena adanya peningkatan permintaan sehingga mendorong penambahan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dan menurunkan pengangguran.

Untuk meredam dampak dari pengaruh positif UMK terhadap pengangguran, maka pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Melalui peningkatan kualitas SDM diharapkan tenaga kerja menjadi lebih produktif karena memiliki keahlian/ketrampilan dan kompetensi yang memadai untuk bersaing di dunia kerja. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan UMK, produsen tidak akan dengan mudah

melakukan PHK. Sedangkan pengembangan jiwa kewirausahaan maka apabila tenaga kerja tersebut tersisih dalam dunia kerja atau terjadi pengurangan tenaga kerja dari perusahaan, mereka dapat berinovasi dengan ketrampilan yang dimiliki untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Karena hasil penelitian ini menunjukkan terdapat variabel-variabel lain selain PDRB riil, IPM, UMK dan inflasi yang dapat memengaruhi TPT dan jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja serta persentase penduduk miskin mempunyai korelasi yang cukup kuat dengan konstanta model *fixed effect* untuk kabupaten/kota, maka penelitian serupa di masa yang akan datang sebaiknya menambahkan variabel jumlah penduduk/jumlah angkatan kerja dan persentase penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Arianti, D. A. 2020. Pengaruh Angka Melek Huruf dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *8*(3), 76–79. https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p76-79.

Arizal. 2019. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Ecogen*, *2*(September), 433–442. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414.

Azizah, F. I. N. 2016. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi, Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23260/

Basrowi, Yuliana, S., Prayogo, A. D., Liana, J. E., Andriansyah, M., & Astridinata, I. K. 2018. *Pengangguran (Perspektif Teoretis)*. Osf.Io. https://osf.io/p43wt/download.

Berenson, M. L., Levine, D. M., Szabat, K. A., & Stephan, D. F. 2020. *Basic Business Statistics, Concepts and Applications* (Global, 14). Pearson.

BI Palembang. 2006. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kep. Bangka Belitung*. http://lib.ibs.ac.id/materi/BI Corner/BI_CORNER_2016/KER_BANGKA BELITUNG/KAJIAN EKONOMI REGIONAL_BANGKA BELITUNG_2006_TW2.pdf

Blanchard, O., Amigini, A., & Giavazzi, F. 2021. *Macroeconomics, A European Perspective* (Fourth). Pearson Education Limited.

BPK. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan*. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021

BPS. 2022a. *Angkatan Kerja*. Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/47

BPS. 2022b. *Apa Saja Manfaat IPM*. https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html

BPS. 2022c. *Indeks Harga Konsumen (IHK)*. https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html

BPS. 2022d. *Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)*. Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/63.

BPS. 2022e. *Indeks Implisit*. Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/5#:~:text=Suatu indeks yang menunjukkan tingkat,tingkat produsen (producer price index.&text=Digunakan untuk mengetahui adanya perubahan, lebih dikenal dengan tingkat inflasi.

BPS. 2022f. *Inflasi*. Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/53

BPS. 2022g. *IPM*. Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1873

BPS. 2022h. *Laju Pertumbuhan PDB/PDRB*. Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/3

BPS. 2022i. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Riil)*. Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7360

BPS. 2022j. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*.Sirusa BPS. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44

BPS Kabupaten Dharmasraya. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya menurut Pengeluaran 2013-2017* (BPS Kabupaten Dharmasraya (ed.)). CV. Graphic Dwipa (Cetakan: I, Oktober 2018) CV. Bhakti Jaya Indonusa (Cetakan: II, Oktober 2018).https://dharmasrayakab.bps.go.id/ publication/2018/08/10/bbe820313c82b6a5ec9e5ca7/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-dharmasraya-menurut-pengeluaran-2013-2017.html

BPS Provinsi Banten. 2022a. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2005-2021*.

BPS Provinsi Banten. 2022b. *PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Juta Rupiah)*. https://banten.bps.go.id/site/resultTab

BPS Provinsi Banten. 2022c. *Provinsi Banten Dalam Angka 2022* (BPS Provinsi Banten (ed.)). BPS Provinsi Banten.

BPS Provinsi Banten. 2022d. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2018-2020*. https://banten.bps.go.id/site/resultTab

BPS Provinsi Banten. 2022e. *Upah Minimum Kabupaten/Kota per bulan di Provinsi Banten (Rupiah)*. BPS Provinsi Banten.

Darman. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun. *Journal The Winter*, *14*(1), 1–12. https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/639/616

DPR RI. 2017. *Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia*. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_CAPAIAN_PERTUMBUHAN_EKONOMI_BERKUALITAS_DI_INDONESIA20140821142017.pdf

DPRI RI. 2014. *Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran*

(Kurva Phillips) di Indonesia. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_analisis_ keberadaan_tradeoff_inflasi _da n _ pe ngangguran _% 28kurvaphillips%29_di_indonesia 20140821142142.pdf

Ernawaningtyas, L. 2021. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan UMP Terhadap Pengangguran di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2011-2019*.

Haryani, S. (2002). *Hubungan Industrial di Indonesia*. UPP AMP YKN.

Hasibuan, S. 2021. *Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia* [Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31132.

Hoechle, D. 2007. Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. *The Stata Journal*, *7*(3), 281–312. https://doi.org/doi.org/10.1177/1536867X0700700301.

Indarti, T. W. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Jawa Tahun 2004-2015. *Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*.

Irwan, & Yuliani, A. 2020. Aplikasi Regresi Data Panel untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten. *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika (Sendika)*, *6*(1), 23–29.

Juanda, B., & Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.

Kinantya, P. 2021. *Dampak Wabah Covud-19 terhadap Industri Jasa Logistik*. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan. https://baketrans.dephub.go.id/berita/dampak-wabah-covid-19-terhadap-industri-jasa-logistik

Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. 2019. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *9*(1).https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436

Mankiw, N. G. 2019. *Macroeconomics* (Tenth). Worth Publishers.

Mankiw, N. G. 2021. *Principles of Economics* (9th ed.). CENGAGE.

Megantara, D. E., Kembar, M., & Budhi, S. 2020. Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *9*(1), 91–119.

Muslim, M. R. 2014. Pengangguran Terbuka dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *15*(2), 171–181. https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1234

Nuridah, S., Junengsih, & Irawan, P. R. 2022. Pengaruh Umur Sukuk, Likuiditasdan Ukuran Perusahaan terhadap Peringkat Sukuk. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, *5*(6), 1844–1848. http://

jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/648/586

Palindangan, J., & Bakar, A. 2021. Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, *5*(1), 65–80. http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/149

Pratiwi, H., Prawastyorini, A. N., & Sugiyanto, S. 2019. Analisis Data Panel Pada Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, *16*(1), 51. https://doi.org/10.20956/jmsk.v16i1.6713

Priastiwi, D., & Handayani, H. R. 2019. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, *9*(1), 159–169. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje/article/view/4058

Putra, D. A. 2016. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kota-Kabupaten, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, *5*(1). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3583

Rambe, R. C., Prihanto, P. H., & Hardiani, H. 2019. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, *8*(1), 54–67. https://doi.org/10.22437/jels.v8i1.11967

Rusman. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Angka Pengangguran di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Journal*, 687–693. https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/163

Sanitra, N. 2020. *Pengaruh Pertumbuhan EKOnomi dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di Indonesia*.

Setiawan, J., Saleh, M., & Yuliati, L. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Journal Ekuilibrium*, *II*(1), 31–37.

Silitonga, D. 2021. Pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Pada Periode 2010-2020. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, *24*(1). https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/231

Sukirno, S. 2019. *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.

Sutawijaya, A. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, *8*(2), 85–101. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/237

Tirta, A. S. 2013. *Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2020. *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

Torres-Reyna, O. 2007. Panel Data Analysis Fixed and Random Effects using Stata (v. 4.2). In *Princenton University* (pp. 1–40). https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101.pdf

Tutupoho, A. 2019. Analisis Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, *XIII*(2), 71–94.

Utari, G. A. D., Cristina, R., & Pambudi, S. 2015. *Inflasi di Indonesia/: Karakteristik dan Pengendaliannya*. Bank Indonesia Institute. http://lib.ibs.ac.id/materi/BI Corner/Terbitan BI/Seri Kebanksentralan/BSK-23-Inflasi-di-Indonesia.pdf

Wahyuni, D. 2005. Peran Sektor Informal dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Economia, 1*(1), 54-64.

Wardiansyah, M., Yulmardi, & Bahri, Z. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi se-Sumatera). *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, *5*(1), 13–18. https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/3924.

Wibisono, S., Sidania, J., & S, R. P. 2017. Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2008-2013. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(2), 169. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5792

Yacoub, Y., & Firdayanti, M. 2019. Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP 2019*, 132–142.

Yustie, R. 2017. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Equilibrium*, 49–57. https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/418.

***